



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RESSA RINDIANI**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**
3. NHK : **833326**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 115.000.000**

1. Tanah Seluas 266 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
2. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 7.700.000
3. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 7.300.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/1 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 39.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 588 m2/36 m2 di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 42.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 19.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR RODA 2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 79.000.000****D. SURAT BERTHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 22.000.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 235.000.000****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 235.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.